

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**

(Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng)

Oleh
Ni Kadek Suci Pratiwi, NIM 1714101016
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di LOKAPOM Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling dengan Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi dari Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang mengaku tidak pernah dikunjungi oleh LOKAPOM untuk dilakukannya pengawasan (2) faktor-faktor penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal meliputi kurangnya jumlah pegawai di LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya sarana prasarana dan faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Pangan Olahan.

IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ARTICLE 21 LETTER b REGULATION

PRESIDENT NUMBER 80 YEAR 2017 RELATED TO IMPLEMENTATION

PROCESSED FOOD CONTROL POLICY

(Case Study of Expired Processed Food Circulation in Buleleng Regency)

By

Ni Kadek Suci Pratiwi, NIM 1714101016

Study Program Law Department

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Implementation of the provisions of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Supervision Policies in Buleleng Regency (2) inhibiting factors for the implementation of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with the research location carried out in Buleleng Regency, especially in LOKAPOM, Buleleng Regency. Collection data techniques used were document study, observation, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the purposive sampling technique with qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of Article 21 Letter b of Presidential Regulation Number 80 of 2017 regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency has not optimally because there are still business actors who claim to have never been visited by LOKAPOM for supervision. (2) Inhibiting factors for the Implementation of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency can be divided into two internal factors including the lack of staff at LOKAPOM Buleleng Regency as well as lack of infrastructure and external factors which include lack of cooperation with other parties and consumers' low knowledge.

Keywords: *Implementation, Policy, Supervision, Processed Food.*